



**NASKAH AKADEMIK**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS RISET DAN INOVASI**  
**[UPETRI] BAPPEDA KABUPATEN BUNGO**

**TAHUN**

**2022**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I     PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pembentukan UPT Brida Bappeda Kabupaten Bungo	3
1.3 Tujuan	4
BAB II    PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS	6
2.1 Isu Global	6
2.2 Isu Strategis	8
BAB III   KERANGKA PIKIR DAN LANDASAN KEBIJAKAN	11
3.1 Kerangka Pikir	11
3.2 Landasan Kebijakan	12
BAB IV    KELEMBAGAAN	18
4.1 Visi dan Misi	18
4.2 Rencana Implementatif	18
4.3 Tugas dan Fungsi	19
4.4 Sasaran	19
4.5 Stuktur Organisasi	20
BAB V     SUMBER DAYA	21
5.1 Sumber Daya Manusia [SDM]	21
5.2 Anggaran	21
5.3 Sarana, Prasarana dan Peralatan	
5.4 Kerjasama	
5.5 Kontribusi UPETRI Bappeda pada Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo	
BAB VI    PENUTUP	23
6.1 Kesimpulan	23
6.2 Saran	24
DARTAR PUSTAKA	25
Lampiran 1	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Di Kabupaten Bungo beragam kekayaan sumber daya hayati (biodiversitas), sumber daya mineral, dan beragam budaya serta adat istiadat untuk meningkatkan kesejahteraan, namun untuk kajian keberagaman tersebut belum didukung dengan kajian pendekatan *evident scientific* karena tidak adanya lembaga-lembaga riset di daerah. Sehingga untuk mendorong inovasi-inovasi berdasarkan kearifan lokal tidak berjalan maksimal. Selain itu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bungo dan sekitarnya belum terlihat berkontribusi terkait dengan riset pengembangan kebijakan dan inovasi.

Disisi lain perkembangan pembangunan disektor UMKM di Kabupaten Bungo terbilang maju dengan berbagai perolehan penghargaan baik ditingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Oleh karena itu, Pemerintah harus mendukung upaya pengelolaan, pengemasan, dan penyediaan berbagai produk informasi yang telah dikaji secara ilmiah. Tanpa adanya dukungan maka akan sulit untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta cita-cita membangun sumber daya manusia unggul menuju Bungo Maju dan Sejahtera.

Kabupaten Bungo dan daerah lainnya belum ada satuan kerja yang melaksanakan kegiatan dasar untuk mengakuisisi, mengembangkan, dan mengemas suatu informasi ke dalam produk-produk informasi yang inovatif dan tersedia secara terbuka untuk publik.

Berbagai informasi mengenai pengetahuan akan sumber daya, baik dari hasil-hasil sistem informasi yang ada ataupun kegiatan riset dari perguruan tinggi merupakan potensi yang harus diolah dan dikembangkan menjadi produk-produk informasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan untuk meningkatkan literasi sumber daya manusia.

Oleh karena itu, agar berbagai potensi pengetahuan tersebut dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk kepentingan bangsa yang berkelanjutan maka Bappeda Kabupaten Bungo perlu suatu satuan kerja setingkat eselon III yang berfokus pada kegiatan-kegiatan dasar dalam pengelolaan suatu informasi, yaitu mencari, mengakuisisi, mengembangkan, mengemas, dan menghasilkan produk-produk informasi yang mudah dan dapat diakses untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kemajuan di daerah. Kegiatan akuisisi, pengembangan, pengemasan dan penyediaan produk informasi yang dimaksud bersifat lintas sektoral yang merupakan unit fungsional dari Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Unit ini bernama **UNIT PELAKSANA TEKNIS RISET [UPETRI] BADAN PERENCANA PEMBANGUANGAN DAERAH [BAPPEDA]**

**UPETRI-BAPPEDA** merupakan satuan kerja yang akan menghasilkan produk-produk informasi berdasarkan kajian ilmiah terhadap seluruh data, fakta ataupun kejadian lainnya yang telah berlangsung sejak lama. UPT ini akan menitikberatkan pada kegiatan diseminasi hasil kegiatan pembangunan, kajian ilmiah dan hasil penelitian di perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya.

**UPETRI BAPPEDA** menjadi penting dan diperlukan keberadaannya di Kabupaten Bungo, karena selama ini belum ada satuan kerja sejenis yang melakukan tugas dan fungsi pengemasan data, fakta ataupun kejadian lainnya ke dalam bentuk produk informasi yang dikaji secara ilmiah, dan disimpan ke dalam public domain. Dengan demikian, produk informasi tersebut dapat diakses dengan mudah, kapan pun dan di mana pun serta oleh siapa pun. Untuk itu, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, **UPTRI BAPPEDA** akan menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima (5) tahunan, yang berisikan prioritas kegiatan setiap tahun untuk menghasilkan produk informasi dalam bentuk digital, baik *e-book* maupun multimedia dan gabungan antara keduanya.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bungo merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Jambi wilayah barat dengan ibukota Muara Bungo. Kabupaten Bungo memiliki luas wilayah sebesar 4.659 km<sup>2</sup> atau 9,80% dari luas Provinsi Jambi (urutan ke-7 dari luas kabupaten/kota se-Provinsi Jambi). Kabupaten Bungo terdiri dari 17 kecamatan yang meliputi 141 dusun dan 12 kelurahan (total 153 dusun/kelurahan). Di Kabupaten Bungo terdapat beragam kekayaan sumber daya hayati (biodiversitas), sumber daya mineral, dan beragam budaya serta adat istiadat untuk meningkatkan kesejahteraan, namun untuk kajian keberagaman tersebut belum didukung dengan kajian pendekatan *evident scientific* karena tidak adanya lembaga-lembaga riset di daerah, sehingga untuk mendorong inovasi-inovasi berdasarkan kearifan lokal tidak berjalan maksimal. Selain itu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bungo dan sekitarnya belum terlihat berkontribusi secara optimal terkait dengan riset pengembangan kebijakan dan inovasi.

Di sisi lain perkembangan pembangunan di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Bungo terbilang maju dengan berbagai perolehan penghargaan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mendukung upaya pengelolaan, pengemasan, dan penyediaan berbagai produk informasi yang telah dikaji secara ilmiah. Tanpa adanya dukungan maka akan sulit untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta cita-cita membangun sumber daya manusia unggul menuju Bungo Maju dan Sejahtera (Master) 2026.

Di Kabupaten Bungo belum terdapat satuan kerja yang

melaksanakan kegiatan dasar untuk mengakuisisi, mengembangkan, dan mengemas suatu informasi ke dalam produk-produk informasi yang inovatif dan tersedia secara terbuka untuk publik.

Berbagai informasi mengenai pengetahuan akan sumber daya, baik dari hasil sistem informasi yang ada ataupun kegiatan riset yang merupakan potensi yang harus diolah dan dikembangkan menjadi produk informasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan untuk meningkatkan literasi sumber daya manusia.

Oleh karena itu, agar berbagai potensi pengetahuan tersebut dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk kepentingan bangsa yang berkelanjutan, maka Bappeda Kabupaten Bungo memerlukan satuan kerja setingkat eselon III (Administrator) yang berfokus pada kegiatan-kegiatan dasar dalam pengelolaan suatu informasi, yaitu mencari, mengakuisisi, mengembangkan, mengemas, dan menghasilkan produk-produk informasi yang mudah dan dapat diakses untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kemajuan di daerah. Kegiatan akuisisi, pengembangan, pengemasan dan penyediaan produk informasi yang dimaksud bersifat lintas sektoral dan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Unit ini diberi nama **UNIT PELAKSANA TEKNIS RISET DAN INOVASI [UPETRI] BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH [BAPPEDA]**.

**UPETRI BAPPEDA** merupakan satuan kerja yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dan melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Selain itu, satuan kerja ini diharapkan menghasilkan produk-produk informasi berdasarkan kajian ilmiah terhadap seluruh data, fakta ataupun peristiwa dalam masyarakat. **UPETRI BAPPEDA** akan menitikberatkan pada kegiatan diseminasi hasil kegiatan pembangunan, kajian ilmiah dan hasil penelitian di perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya.

**UPETRI BAPPEDA** menjadi penting dan diperlukan keberadaannya di Kabupaten Bungo, karena selama ini belum ada satuan kerja sejenis yang melakukan tugas dan fungsi pengemasan data, fakta ataupun peristiwa lainnya ke dalam bentuk produk informasi yang dikaji secara ilmiah dan disimpan ke dalam domain publik. Dengan demikian, produk informasi tersebut dapat diakses dengan mudah, kapan pun dan di mana pun serta oleh siapa pun. Untuk itu, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, **UPETRI-BAPPEDA** akan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), yang berisikan prioritas kegiatan setiap tahun untuk menghasilkan produk informasi dalam bentuk digital, baik *e-book* maupun multimedia dan gabungan antara keduanya.

## **1.2 Pembentukan UPETRI Bappeda Kabupaten Bungo**

Produksi informasi oleh lembaga yang memiliki SDM profesional yang mampu menghasilkan produk informasi untuk mendukung rumusan perencanaan pembangunan dan dapat meningkatkan literasi yang akan mendukung terbentuknya SDM yang unggul dan kompetitif sebagaimana Misi Pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026.

Saat ini terdapat beberapa institusi di daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan informasi yakni Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Namun ketiga institusi pemerintah tersebut tidak menyediakan produk informasi terkait dengan kajian kearifan lokal, sumber daya, kajian ekonomi kreatif, kajian tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas hidup dan lain-lain yang menjadi variabel kesejahteraan dan penyediaan produk-produk informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah. Pada institusi tersebut belum ada kegiatan dasar dalam upaya mengakuisisi, mengemas, memproduksi, dan menyebarkan informasi yang relevan dan



inovatif serta dapat diakses secara terbuka untuk publik, kapan pun, di mana pun, dan oleh siapa pun.

Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah pusat akuisisi dan pengemasan informasi yang fokus melakukan kegiatan untuk mengakuisisi dan mengemas data, fakta ataupun peristiwa yang telah dan akan dikaji secara ilmiah ke dalam bentuk produk informasi. Semua produk informasi tersebut tersedia untuk publik yang dapat diakses dengan mudah, kapan pun, di mana pun dan oleh siapa pun. Adanya institusi tersebut menjadi sangat strategis guna mendukung terwujudnya cita-cita meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan produktivitas dan kualitas publikasi nasional, baik dalam bentuk jurnal, buku, maupun produk multimedia. Dengan adanya institusi tersebut diharapkan mampu menangani pengelolaan dan penyediaan produk informasi yang terkait dengan penyebarluasan hasil penelitian sebagai produk akhir kegiatan ilmiah.

Salah satu pola dalam membangun Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) yang dibahas dan disampaikan pada acara Webinar Seri 1 Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tanggal 25 Mei 2022 adalah dengan memakai pola penggabungan Badan Riset dan Inovasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [Bappeda], dengan ringkasan sebagai berikut:

- a. Nomenklatur badan hasil penggabungan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA);
- b. Tipe BAPPERIDA hasil penggabungan Urusan Pemerintahan dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi;
- c. Ketentuan dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi, yaitu apabila digabung dengan BAPPEDA tipe C menjadi BAPPERIDA tipe B, digabung dengan BAPPEDA tipe B menjadi BAPPERIDA tipe A, dan

digabung dengan BAPPEDA tipe A menjadi BAPPERIDA tipe A dengan 5 (lima) bidang;

- d. Fungsi BRIDA yang digabung dengan BAPPEDA paling banyak 2 (dua) bidang yang dipimpin oleh pejabat administrator dan membawahi kelompok Jabatan Fungsional (JF);
- e. Dalam hal Fungsi BRIDA digabung dengan BAPPEDA diwadahi dalam 1 (satu) bidang, dengan nomenklatur bidang riset dan inovasi daerah yang di kepalai pejabat administrator dan membawahi kelompok JF.

Pola penggabungan ini adalah berdasarkan Pasal 217 dan 219 UU 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016, sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:



10

Sumber Diagram: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, 2022

### Gambar 1.1 Pola Perangkat Daerah Berdasarkan UU 23 Tahun 2014

BRIDA sebagai perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan tidak membuat Badan Baru, dimaknai penguatan fungsi Litbang, atau fungsi Litbang diperluas. Maka Kabupaten Bungo memakai pola penggabungan Badan Riset Daerah dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah [Bappeda] bernama **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**RISET DAN INOVASI BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BUNGO dengan singkatan UPETRI Bappeda Kabupaten Bungo.**

UPETRI Bappeda Kabupaten Bungo akan bertugas mengakuisisi, mengelola, dan memanfaatkan berbagai informasi, baik yang bernilai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kearifan lokal bagi kepentingan dan daya saing.

### **1.3 Tujuan**

Tujuan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Riset Badan Perencana Pembangunan Daerah [UPETRI-BAPPEDA] Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut.

1. Mengakuisisi informasi yang bernilai ilmu pengetahuan, baik hasil kegiatan penelitian maupun pengetahuan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bungo, khususnya yang selama ini belum banyak diketahui dan dimanfaatkan masyarakat.
2. Meningkatkan kapasitas pembelajaran pengemasan produk-produk informasi, melalui kegiatan penerbitan dan pengemasan serta produksi multimedia.
3. Menyediakan domain publik yang berisi berbagai informasi yang bernilai ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengetahuan akan berbagai kekayaan sumber daya ke dalam bentuk produk-produk informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat kapan pun, di mana pun, dan oleh siapa pun sehingga dapat meningkatkan literasi sumber daya manusia unggul.
4. Memperkuat jejaring dan kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk lingkup nasional, regional, dan internasional dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kekayaan sumber daya melalui produk-produk informasi yang kredibel dan inovatif.



## **BAB II**

### **PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS**

#### **2.1 Isu Global**

Perkembangan teknologi informasi dan media komunikasi, globalisasi yang beriringan dengan modernisasi menyebar ke seluruh penjuru dunia sebagai proses yang tak terelakkan. Globalisasi yang didorong oleh teknologi informasi & media komunikasi sedang memerankan sebuah revolusi sosial yang merasuki semua sudut kehidupan. Ia mengaburkan batas-batas tradisional yang membedakan bisnis, media dan pendidikan, merombak struktur dunia usaha, mendorong pemaknaan ulang perdagangan dan investasi, kesehatan, hiburan, pemerintahan, pola kerja, perdagangan, pola produksi, bahkan pola relasi antarmasyarakat dan antar individu (Justiani, 2009). Dunia tanpa batas sebagai konsekuensi globalisasi tersebut mendorong masyarakat untuk menyatu sebagai komunitas dunia yang terhubung semakin dekat melalui jaringan internet dan alat komunikasi lainnya.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini memasuki era Revolusi Industri 4.0, di antaranya ditandai dengan berbagai teknologi terapan (applied technology), seperti advanced robotic, artificial intelligence, internet of things (IoT), human-machine interface, virtual and augmented reality, big data, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation. Lebih lanjut Gerbert dkk. (2015) menyatakan ada 9 teknologi yang akan mendominasi dalam industri produksi seperti terlihat pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1** Teknologi Produksi Bertransformasi dalam Industri 4.0

Pada revolusi industri 4.0, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai kegiatan sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik. Revolusi Industri merupakan titik balik dalam sejarah yang ditandai dengan perubahan secara besar-besaran di berbagai bidang.

Priyanto (2018) mengatakan bahwa disrupsi sejatinya “efisiensi”, tetapi menimbulkan berbagai persoalan, terutama bagi pihak yang tidak mampu mengikuti perubahan dan tidak produktif. Kunci dari era industri generasi keempat ini tidak lagi bertumpu pada ukuran besarnya organisasi, tetapi kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang begitu cepat agar mampu bertahan dalam iklim kompetitif dan dinamis.

The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO, 2016) menekankan agar kehadiran Revolusi Industri 4.0 bisa mendorong

terwujudnya agenda-agenda pembangunan, seperti yang tertuang dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs). Namun, dikhawatirkan terjadi gap antara negara-negara maju yang telah mampu mengaplikasikan teknologi dan negara-negara berkembang yang masih tertinggal dalam pengembangan teknologi. UNIDO (“Perkembangan Revolusi Industri 4.0”, 2018) menegaskan beberapa poin penting terkait perkembangan Revolusi Industri 4.0, yakni

1. Revolusi Industri 4.0 diharapkan bermanfaat untuk kepentingan manusia, lingkungan, dan kesejahteraan bersama.
2. Revolusi Industri 4.0 diharapkan mampu mendorong pengembangan kapasitas manusia sehingga menjadi makin terdidik dan terampil.
3. Akses terhadap teknologi diharapkan dapat terjangkau dengan mudah sehingga bisa diterapkan di semua negara.
4. Kemajuan teknologi diharapkan mampu menghasilkan keterbukaan informasi.
5. Kemajuan teknologi diharapkan mampu menggeser paradigma lama, dari persaingan (competition) menjadi koneksi (connection) dan kerja sama (collaboration).
6. Penerapan teknologi diharapkan mampu menjawab tantangan perubahan iklim dan upaya pelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjawab tantangan di era Revolusi Industri 4.0, di antaranya (1) mengidentifikasi area strategis dalam rangka meningkatkan kecepatan, fleksibilitas, produktivitas, dan kualitas luaran; (2) menganalisis dampak pemanfaatan teknologi dalam jangka panjang, terutama dalam serapan tenaga kerja dan lingkungan hidup; dan (3) mempersiapkan infrastruktur serta program pendidikan dan keterampilan sehingga mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

## **2.2 Isu Strategis**

Di Indonesia tahun 2013-2014 penduduk usia produktif berjumlah sekitar 62,7% dari keseluruhan populasi penduduk sebesar 237 juta orang, dan mengalami potensi kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya hingga mencapai puncaknya pada 2035 [LIPI, 2015]. Bonus demografi ini bisa menjadi kekuatan dalam meningkatkan daya saing bangsa. WEF memprediksi Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar dunia. Pada tahun 2030, Tiongkok akan menjadi negara ekonomi terbesar di dunia, disusul India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Namun, di sisi lain, kebutuhan akan ketersediaan lapangan kerja dan sumber pencaharian akan menjadi hal yang mengkhawatirkan pemenuhannya.

Ironisnya, beberapa kajian menyimpulkan bahwa ada ketidakselarasan kualitas dan relevansi lulusan pendidikan terhadap tuntutan pasar tenaga kerja. Hal ini bisa kita cermati dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2017), bahwa sebanyak 50,17% tenaga kerja lulusan sekolah menengah banyak yang tidak terserap dalam pasar kerja.

Selaras dengan data tersebut, riset dari Bank Dunia tahun 2018 menyebutkan bahwa Indeks Sumber Daya Manusia (Human Capital Index/HCI) Indonesia berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Nilai HCI Indonesia adalah 0,53 tertinggal dari beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura 0,88, Malaysia 0,62, Vietnam 0,67, Thailand 0,60, dan Filipina 0,55. Singapura sendiri menduduki peringkat pertama di dunia dalam skala HCI ("SDM Unggul, Indonesia Maju", 2019).

Di Kabupaten Bungo IPM Fondasi SDM yang berkualitas sebagai menjadi modal intelektual dan sosial guna menyiapkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global di masa mendatang. Namun, apakah pemerintah sudah menyiapkan SDM unggul yang produktif dan berkualitas dalam menyongsong persaingan di era Revolusi Industri 4.0 dan sejauh mana upaya pemerintah meningkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan



(Sustainable Development Goals) agar tidak boleh ada warga yang tertinggal dari kemajuan sosial ekonomi.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Kabupaten Bungo telah menyusun rumusan kebijakan yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bungo tahun 2021-2026. Dimana diantara misi pembangunan tersebut adalah upaya serius dalam peningkatan sumber daya manusia yakni membangun SDM yang unggul tahun 2026.

UPETRI Bappeda akan merespons isu strategis ini melalui kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat mendukung program pemerintah demi terciptanya SDM unggul sebagai modal untuk memajukan bangsa. UPETRI Bappeda sebagai satuan kerja yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan akuisisi, pengembangan, dan pengemasan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal memiliki posisi penting dalam menghasilkan produk-produk informasi yang bermanfaat sebagai bahan pengambilan kebijakan dan peningkatan literasi bangsa.

Kedepan UPETRI akan berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bungo yakni Universitas Muara Bungo [UMB], Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi [STIA] Muara Bungo, Universitas Muhammadiyah Muara Bungo [UMMUBA], Sekolah Tinggi Agama Islam, Akademi Keperawatan Setih Setio Muara Bungo, Akademi Kebidanan Amanah, dan beberapa perguruan tinggi di kabupaten tetangga.

## **BAB III**

### **KERANGKA PIKIR DAN LANDASAN KEBIJAKAN**

#### **3.1 Kerangka Pikir**

Di Kabupaten Bungo beragam kekayaan sumber daya hayati (biodiversitas), sumber daya mineral, dan beragam budaya serta adat istiadat untuk meningkatkan kesejahteraan, namun untuk kajian keberagaman tersebut belum didukung dengan kajian pendekatan evident scientific karena tidak adanya lembaga-lembaga riset di daerah. Sehingga untuk mendorong inovasi-inovasi berdasarkan kearifan lokal tidak berjalan maksimal. Selain itu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bungo dan sekitarnya belum terlihat berkontribusi terkait dengan riset pengembangan kebijakan dan inovasi.

Disisi lain perkembangan pembangunan disektor UMKM di Kabupaten Bungo terbilang maju dengan berbagai perolehan penghargaan baik ditingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Oleh karena itu, Pemerintah harus mendukung upaya pengelolaan, pengemasan, dan penyediaan berbagai produk informasi yang telah dikaji secara ilmiah. Tanpa adanya dukungan maka akan sulit untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta cita-cita membangun sumber daya manusia unggul menuju Bungo Maju Sejahtera.

Kabupaten Bungo dan daerah lainnya belum ada satuan kerja yang melaksanakan kegiatan dasar untuk mengakuisisi, mengembangkan, dan mengemas suatu informasi ke dalam produk-produk informasi yang inovatif dan tersedia secara terbuka untuk publik.

Berbagai informasi mengenai pengetahuan akan sumber daya, baik dari hasil sistem informasi yang ada ataupun kegiatan riset dari perguruan tinggi merupakan potensi yang harus diolah dan

dikembangkan menjadi produk- produk informasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan untuk meningkatkan literasi sumber daya manusia.

Oleh karena itu, agar berbagai potensi pengetahuan tersebut dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk kepentingan bangsa yang berkelanjutan maka Bappeda Kabupaten Bungo perlu suatu satuan kerja setingkat eselon III yang berfokus pada kegiatan-kegiatan dasar dalam pengelolaan suatu informasi, yaitu mencari, mengakuisisi, mengembangkan, mengemas, dan menghasilkan produk-produk informasi yang mudah dan dapat diakses untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kemajuan di daerah. Kegiatan akuisisi, pengembangan, pengemasan dan penyediaan produk informasi yang dimaksud bersifat lintas sektoral yang merupakan unit fungsional dari Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Unit ini bernama **UNIT PELAKSANA TEKNIK RISET [UPTRI] BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH [BAPPEDA]**.

**UPTRI-BAPPEDA** merupakan satuan kerja yang akan menghasilkan produk-produk informasi berdasarkan kajian ilmiah terhadap seluruh data, fakta ataupun kejadian lainnya yang telah berlangsung sejak lama. UPT ini akan menitikberatkan pada kegiatan diseminasi hasil kegiatan pembangunan, kajian ilmiah dan hasil penelitian di perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya.

**UPTRI-BAPPEDA** menjadi penting dan diperlukan keberadaannya di Kabupaten Bungo, karena selama ini belum ada satuan kerja sejenis yang melakukan tugas dan fungsi pengemasan data, fakta ataupun kejadian lainnya ke dalam bentuk produk informasi yang dikaji secara ilmiah, dan disimpan ke dalam public domain. Dengan demikian, produk informasi tersebut dapat diakses dengan mudah, kapan pun dan di mana pun serta oleh siapa pun. Untuk itu, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, **UPTRI-BAPPEDA** akan menyusun

Rencana Strategis (Renstra) lima (5) tahunan, yang berisikan prioritas kegiatan setiap tahun untuk menghasilkan produk informasi dalam bentuk digital, baik e-book maupun multimedia dan gabungan antara keduanya.

### **3.2 Landasan Kebijakan**

Beberapa landasan kebijakan dan dasar hukum sebagai alasan penting yang mendasari perlu adanya penggabungan dua satuan kerja (UPT] serta pengembangan dan peningkatan status eselonisasi dari Eselon III, yaitu menjadi Unit Pelaksana Teknis Riset dan Inovasi (UPETRI) Bappeda Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 231 dan 219
2. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah Pasal 25 dan Pasal 46 ayat 7
4. Peraturan Presiden Nomor 78/2021 pasal 66 ayat 1 dan 2
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
2. Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 5 Amandemen IV, dinyatakan bahwa “Pemerintah wajib memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (iptek) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Hal ini merupakan landasan kuat Bangsa Indonesia yang menjadi semangat pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam kehidupan berbangsa.
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi (Sisnasiptek) bertujuan memperkuat iptek dengan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian untuk memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pusat Multimedia dan Penerbitan Ilmiah LIPI (PMPI-LIPI) untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui penyebaran produk-produk informasi (visual, audio, dan audio-visual), baik dalam bentuk tercetak maupun digital.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Regulasi ini menyatakan setiap penerbit atau pengelola multimedia wajib menyerahkan hasil produksinya, baik terbitan maupun produk informasi multimedia kepada pihak-pihak yang berwenang.
6. [Bimbingan dan pengawasan Umum oleh Kemendagri \(Psl 8 UU No 23 Th 2021\)](#)
7. [Sebagai Badan fungsi penunjang, pedoman Nomenklatur Pembentukan BRIDA ditetapkan dengan Permendagri Pasal 25 dan Pasal 46 ayat \(7\) PP 18 Thn 2016](#)
8. Perpres Nomor 78 Tahun 2021, [Binwas Teknis \(Menetapkan NSPK\) oleh BRIN pasal 57](#)
9. BRIDA sebagai perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan tidak mesti membuat Badan Baru, dimaknai penguatan fungsi Litbang, atau fungsi Litbang yg diperluas, yg diikuti dg mengganti nama Balitbang menjadi BRIDA. Rapat Koordinasi Bersama Sekretaris DPRD, Kepala Biro Organisasi SETDA dan Kepala Badan Litbang/ Beppelitbang Se-Indonesia, Senin 14 Juli 2022.



## **BAB IV**

### **KELEMBAGAAN**

#### **4.1 Visi dan Misi**

##### **VISI**

“Menjadi pusat multimedia dan penerbit ilmiah yang terdepan dan inovatif dalam mengemas dan mengomunikasikan pengetahuan lokal.”

##### **MISI**

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap pengetahuan dan kearifan lokal secara tepat dan akurat, sekaligus mengolahnya menjadi produk informasi yang inovatif.
2. Ikut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui produk- produk informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat sehingga dapat meningkatkan literasi ilmu pengetahuan..
3. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan berdasarkan pengetahuan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan kinerja dan tata kelola lembaga riset yang baik (good corporate governance).

#### **4.2 Rencana Implementatif**

UPTRI Bappeda Kabupaten Bungo merencanakan kegiatan untuk 5 tahun ke depan guna mendukung upaya peningkatan daya saing bangsa melalui kegiatan akuisisi, pengembangan, dan pengemasan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal untuk menghasilkan produk-produk informasi yang bermanfaat sebagai bahan pengambilan kebijakan dan peningkatan literasi. Metode yang dikembangkan diharapkan adalah metode yang mengedepankan masyarakat sebagai pemilik ilmu

pengetahuan dan kearifan lokal yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki. Untuk mencapai tujuan tersebut maka rencana program ke depan adalah penajaman program strategis dalam bidang teknologi informasi, khususnya pada multimedia dan penerbitan ilmiah.

### **4.3 Tugas dan Fungsi**

#### **4.3.1 Tugas**

UPETRI Bappeda memiliki tugas sebagai berikut.

1. Membantu Kepala Bappeda dalam mengakuisisi dan mengemas serta menyebarluaskan informasi ilmu pengetahuan mengenai kearifan lokal.
2. Membantu Kepala Bappeda dalam melestarikan dan mengonservasi kearifan lokal yang bernilai Iptek sehingga dapat meningkatkan literasi dan daya saing daerah
3. Memproses dan mengelola bahan-bahan informasi dan pengetahuan menjadi produk-produk informasi yang diperlukan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (termasuk komunitas ilmiah);
4. Menyediakan wadah atau media promosi dan diseminasi yang tepat sehingga produk informasi dan pengetahuan yang dihasilkan dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan,
5. **Pengembangan, pembinaan, dan pengawasan** kualitas produk informasi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. **Menjadi pelaksana teknis di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem penerbitan ilmiah.**
7. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

#### **4.3.2 Fungsi**



- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
- h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;

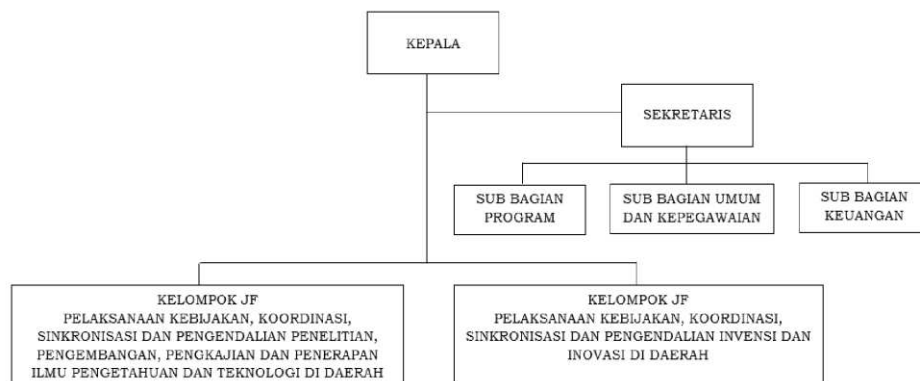
- i. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah

#### 4.4 Sasaran

- a. Terciptanya domain publik berisi pengetahuan dan kearifan lokal dalam bentuk produk-produk informasi yang dapat diakses masyarakat luas.
- b. Terfasilitasinya masyarakat sebagai pemilik pengetahuan dan kearifan lokal.
- c. Terciptanya tata kelola yang profesional, efektif, efisien dengan menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG).
- d. Terciptanya produk-produk informasi berbasis pengetahuan dan kearifan lokal sebagai dasar pembuatan kebijakan.

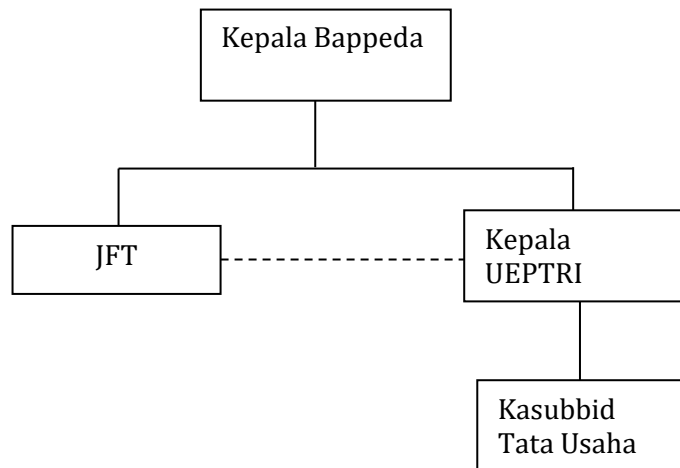
#### 4.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang Permendagri terkait Badan Riset Daerah yang dipaparkan dalam rapat koordinasi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2022 mengajukan bagan struktur organisasi Badan Riset Daerah adalah sebagai berikut gambar 4.1



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Rancangan Permendagri Terkait Brida

Berdasarkan rancangan struktur organisasi Bida oleh Permendagri tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bungo bersama Tim Pembentukan Bida Kabupaten Bungo mengusulkan rancangan bagan Struktur Organisasi UPTRI Bappeda Kabupaten Bungo sebagaimana terlihat pada gambar 4.2 dibawah ini:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi UPETRI Bappeda Kabupaten Bungo

Dari gambar 4.2 Kepala UPETRI adalah eselon III yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda dibantu kepala subbidang tata usaha. Dalam pengelolaan produk informasi, multimedia dan penerbitan artikel berkoordinasi dengan pejabat fungsional.

## BAB V

### SUMBER DAYA

#### 5.1 Sumber Daya Manusia [SDM]

Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu komponen penting dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di UPETRI Bappeda sebagai satuan kerja unit fungsional teknis setingkat eselon tiga yang bertugas sebagai penyedia produk informasi dapat diuraikan menurut jenjang pendidikan sebagai berikut

NO	Jabatan	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Administrator	Sarjana	2 orang
2	Fungsional Tertentu	S1	5 orang
		S2	3 orang
		S3	2 orang

#### 5.2 Anggaran

Di samping Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran juga merupakan faktor yang sangat penting, dalam menjalankan tugas dan fungsi UPETRI Bappeda yang terdiri dari komponen:

- a) Tata kelola, mencakup pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;
- b) Peningkatan jasa pelayanan, yaitu berupa kegiatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Anggaran dipengaruhi oleh *output* capaian terbitan. Hal ini terjadi karena jumlah naskah hasil-hasil penelitian dan kajian yang diajukan penerbitannya, baik dari UPETRI Bappeda atau OPD lain yang meminta setiap tahunnya. Anggaran UPETRI Bappeda diusulkan melalui Rencana Kerja Anggaran [RKA] Bappeda Kabupaten Bungo.

### 5.3 Sarana dan Prasarana

Data sarana dan prasarana penunjang yang sudah ada di Bappeda Kabupaten Bungo yang akan dikelola oleh UPETRI dapat dilihat pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1** Sarana dan Prasarana UPETRI Bappeda Kabupaten Bungo

No	Uraian	Jumlah
1.	Ruang Kerja [4 x 6 m]	1 ruang
2.	Ruang Rapat [4 x 8 m]	2 ruang
3.	Infocus/proyektor	5 unit
4	Kamera digital	5 unit
5	Laptop	6 unit
6	PC Unit	3 unit
7	<i>Ultra Mobile PC</i>	-
8	<i>Printer</i> (Peralatan Personal Komputer)	6 unit
9	<i>Scanner</i> (Peralatan MiniKomputer)	5 unit
10	Drone	1 unit

### 5.4 Kerjasama UPETRI Bappeda

#### 5.4.1 Kerjasama Merumuskan Kebijakan Pembangunan

Bappeda merupakan lembaga pemerintah daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas merumuskan perencanaan pembangunan di yang berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah dan semua unsur terkait yang berpotensi memberikan kontribusi dalam rumusan kebijakan pembangunan.

Semua potensi tersebut akan menjadi kajian rutin dengan pendekatan *scientetifc base* oleh UPETRI Bappeda. Luaran kegiatan dapat berupa pangkalan data, karya intelektual dalam bentuk laporan penelitian, jurnal, prosiding, buku, , dan *policy brief*.

Produk-produk informasi tersebut akan dijadikan kajian kebijakan dalam pembangunan di Kabupaten Bungo mulai dari RPJPD, RPJMD, Restra, dan kegiatan lainnya yang mendukung inovasi daerah.

#### **5.4.2 Kerjasama dengan Perguruan Tinggi**

Guna meningkatkan kontribusi dalam rumusan kebijakan, invensi dan inovasi daerah, UPETRI Bappeda menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi secara simbiosis mutualisme yakni perguruan tinggi berkontribusi memberikan hasil publikasi kepada pemerintah melalui UPETRI Bappeda dan Pemerintah Daerah ikut membina dan membimbing pelaksanaan penelitian dan publikasi yang berkonten evaluasi, invensi dan inovasi pembangunan.

Perguruan tinggi dimaksud antara lain Universitas Terbuka, Universitas Jambi, Universitas Muara Bungo, Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Institut Ilmu Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo, Institut Agama Islam Yasni Muara Bungo, Akademi Kebidanan Amanah Muara Bungo, dan Perguruan Tinggi Lainnya.

#### **5.4.3 Kerjasama Sesama Perangkat Daerah**

Dalam mendukung Satu Data Indonesia [SDI] sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia maka UPETRI Bappeda bersama-sama dengan BPS, Dinas Kominfo dan Persandian, serta OPD lainnya memproduksi Statistik Sektorial, yakni data dan indikator pembangunan yang tidak diproduksi datanya oleh BPS.

### **5.5 Kontribusi UPETRI Bappeda terhadap Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah**

UPETRI Bappeda Kabupaten Bungo merupakan unit pelaksana teknis yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas

menyelenggarakan kajian untuk menghasilkan konsep, rumusan, dan pertimbangan bagi penyusunan kebijakan daerah. Luaran kegiatan kajian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat berupa karya intelektual dalam bentuk purwarupa (*prototype*) serta paket-paket teknologi dan proses yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Aktivitas penelitian dan pengembangan yang menghasilkan luaran yang berupa *policy brief* produk karya cipta intelektual, seperti laporan penelitian, jurnal, prosiding, buku, pangkalan data, dan bentuk terbitan lain. Agar produk-produk informasi dan pengetahuan (*knowledge*) tersebut dapat dimanfaatkan dan didiseminasikan kepada masyarakat pengguna dan pemangku kepentingan lainnya, diperlukan suatu wadah penerbitan ilmiah yang dikelola secara profesional. Wadah penerbitan ilmiah seperti ini juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Bappeda Kabupaten Bungo dalam mendiseminasikan pengetahuan kepada pemangku kepentingan melalui publikasi ilmiah yang berkualitas sesuai dengan kaidah-kaidah yang dipersyaratkan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Besarnya potensi kajian-kajian berbasis data, ilmu pengetahuan [*sciencetific base*] dan teknologi, baik dari hasil kegiatan penelitian dan pengembangan maupun statistik sektoral merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk dapat mengolah dan mengemasnya menjadi produk informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan rumusan kebijakan, inovasi dan literasi daerah. Untuk mencapai tujuan besar tersebut, perlu dilakukan beberapa hal berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan Bappeda memenuhi kebutuhan terhadap hasil kajian penelitian terhadap ketersediaan informasi yang mudah diakses.
- b. Meningkatkan efektivitas pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dari perguruan tinggi.
- c. Meningkatkan arus komunikasi yang lancar Tim Statistik Sektoral demi terwujudnya Satu Data Indonesia [SDI].
- d. Meningkatkan pengembangan kemampuan kompetensi SDM yang ada dalam meningkatkan pelayanan teknis dalam bidang pengolahan dan pengemasan informasi.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan tujuan, tugas, fungsi dan kebutuhan daerah tersebut maka pembentukan **Unit Pelaksana Teknis Riset dan Inovasi [UPETRI] Bappeda** yang mendesak untuk direalisasikan.



## **6.2 Harapan**

Terbentuknya UPETRI Bappeda Kabupaten Bungo diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam memperkuat tugas pokok Bappeda dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, pada akhirnya memiliki implikasi luas terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dalam upaya peningkatan literasi proses pembangunan sumber daya manusia unggul bagi kemajuan Bungo. Selain itu, dengan adanya Pusat Multimedia dan Penerbitan Ilmiah diharapkannya dapat dikemas menjadi inovasi daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Justiani. (2009). Globalisasi dan nasionalisme Indonesia. Surabaya Post, 27 April 2009.
- Priyanto, I.F. (2018). Menghadapi era normal baru. Kolom Opini, Kompas.